



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

Badan Pengelola Keuangan dan Aser Daerah



Kabupaten Kotabaru

2016



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayat dan Inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dapat kami selesaikan.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya yang telah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Keberhasilan sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi pencapaian target indikator Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian keberhasilan dan atau kegagalan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini tentu saja karena dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

Semoga laporan kinerja ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Kotabaru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kotabaru, Februari 2017

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,

H. ABDUL KADIR, S.Sos, MAP
NIP. 19620310 198503 1 023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1. Kedudukan	3
2. Tugas Pokok	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	12
A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	17
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016	17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja/Capaian Kinerja Dari Tahun 2012 s/d 2016	23
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Tertuang dalam Renstra BPKAD	24
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	25
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27



6. Analisis program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV : PENUTUP	39
A. Simpulan	39
B. Saran	39

LAMPIRAN :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
3. Rencana Kegiatan Tahunan
4. Penetapan Kinerja Tahunan



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru melaksanakan rencana strategis.

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Penyampaian LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016–2021, yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2016. Kinerja Perangkat Daerah BPKAD secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proporsional dan memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah BPKAD dalam pelaksanaan pencapaian target dapat terealisasi sesuai dengan harapan tidak lepas dari dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan BPKAD dari 55 orang Aparatur Sipil Negara dan 24 orang Tenaga Non PNS yang harus melayani 57 SOPD, 1 PPKD serta Bupati/Wakil Bupati. Perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam melayani SOPD lain cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotabaru



Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

B. Kedudukan dan Tugas Pokok

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah. Uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah;



- c. Menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Badan;
- d. Menyelenggarakan dan menetapkan Pengelolaan kesekretariatan Badan;
- e. Menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang anggaran;
- f. Menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang perbendaharaan;
- g. Menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang akuntansi;
- h. Menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang aset;
- i. Menyelenggarakan proses penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
- j. Menyelenggarakan penyusunan RKA-SKPD;
- k. Menyelenggarakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- l. Menyelenggarakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. Menyelenggarakan tugas Pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- n. Menyelenggarakan pemantauan terkait penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- o. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD;
- p. Menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang daerah;



- q. Menyelenggarakan pembayaran perhitungan pihak ketiga atas beban APBD berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, Iuran Wajib Pajak, Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) dan beban perhitungan pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan berlaku;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pengelola keuangan dan aset daerah;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan kebijakan bidang tugas;
- t. Menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Badan;
- u. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari :

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan Pengelola kesekretariatan Badan. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang Pengelola anggaran. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

d. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang Pengelola perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
2. Sub Bidang Pengelola Kas.

e. Bidang Akuntansi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang Pengelola akuntansi. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelola Data Akuntansi;
2. Sub Bidang Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan.

f. Bidang Aset

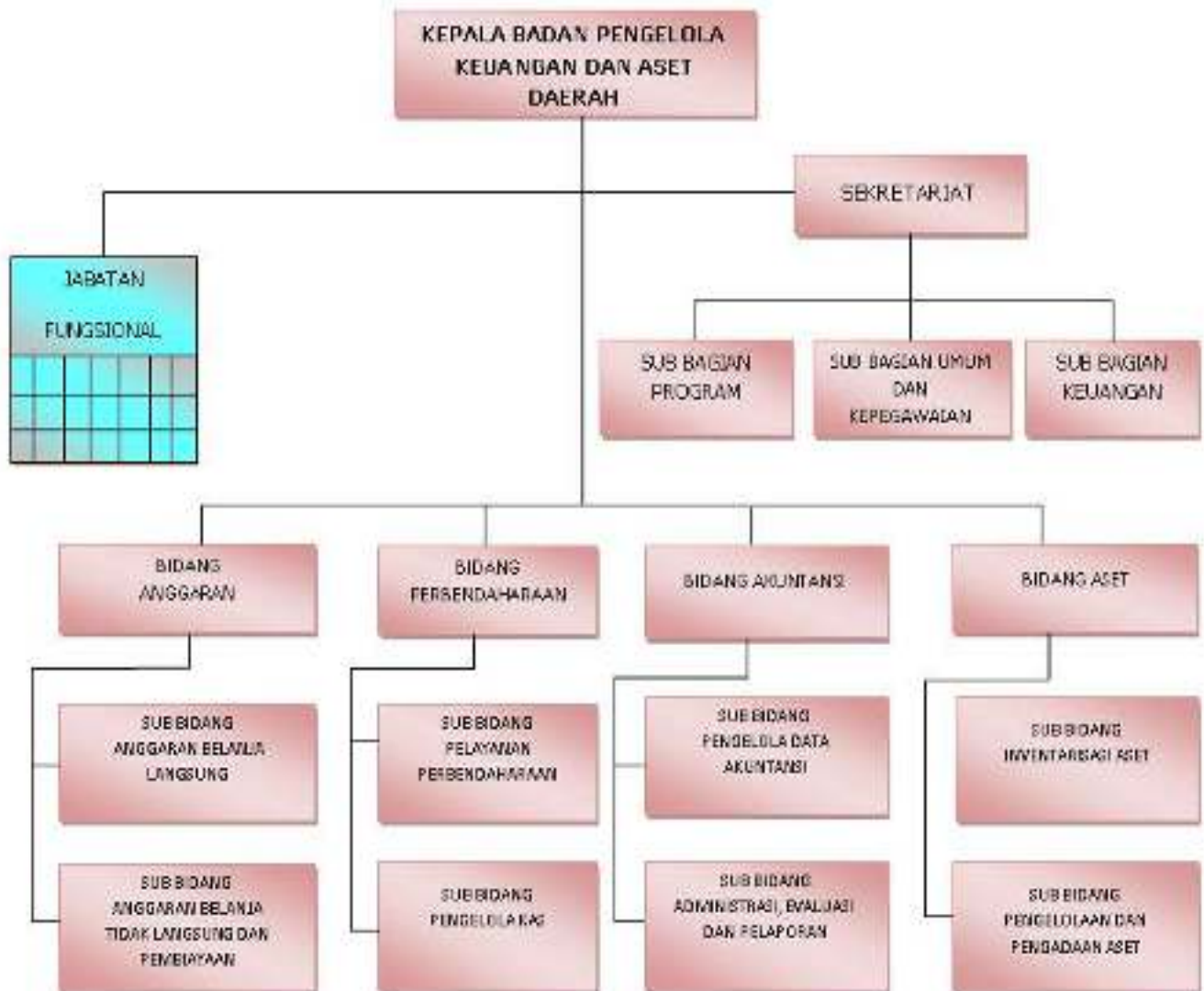
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dalam menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang Pengelola aset. Bidang Aset terdiri dari :

1. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
2. Sub Bidang Pengadaan Pengelolaan Aset.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

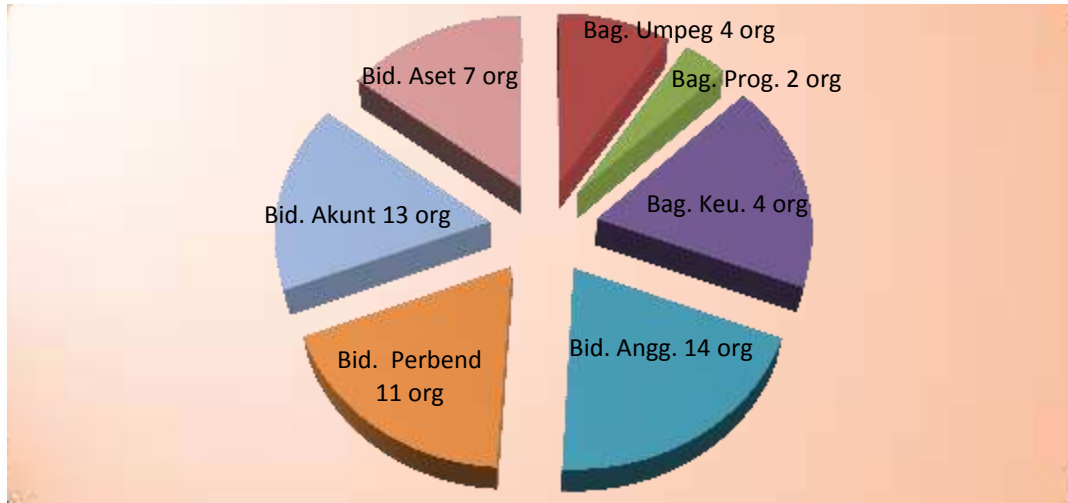


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

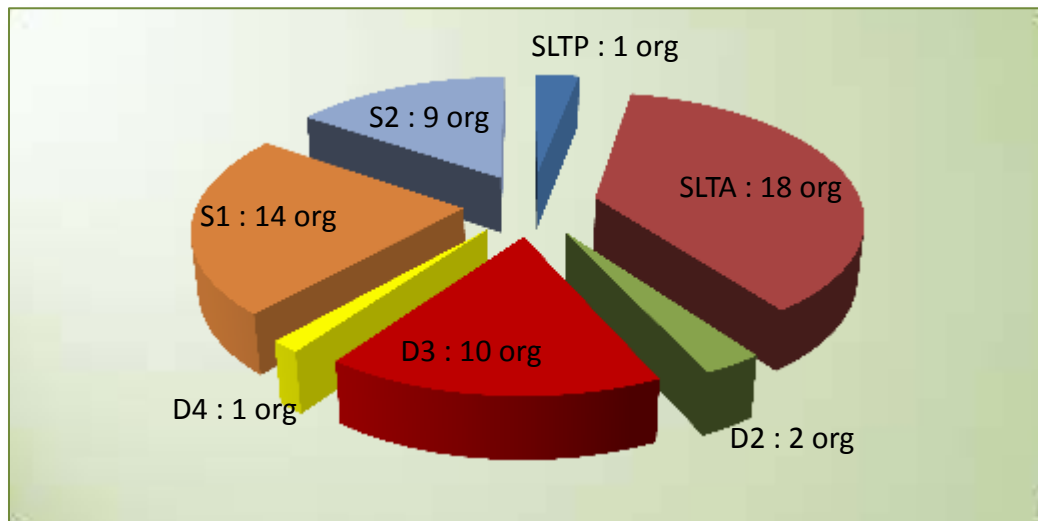




Jumlah Pegawai/Staf Masing-Masing Bidang/Bagian Pada Kantor BPKAD Kabupaten Kotabaru s/d 31 Desember 2016

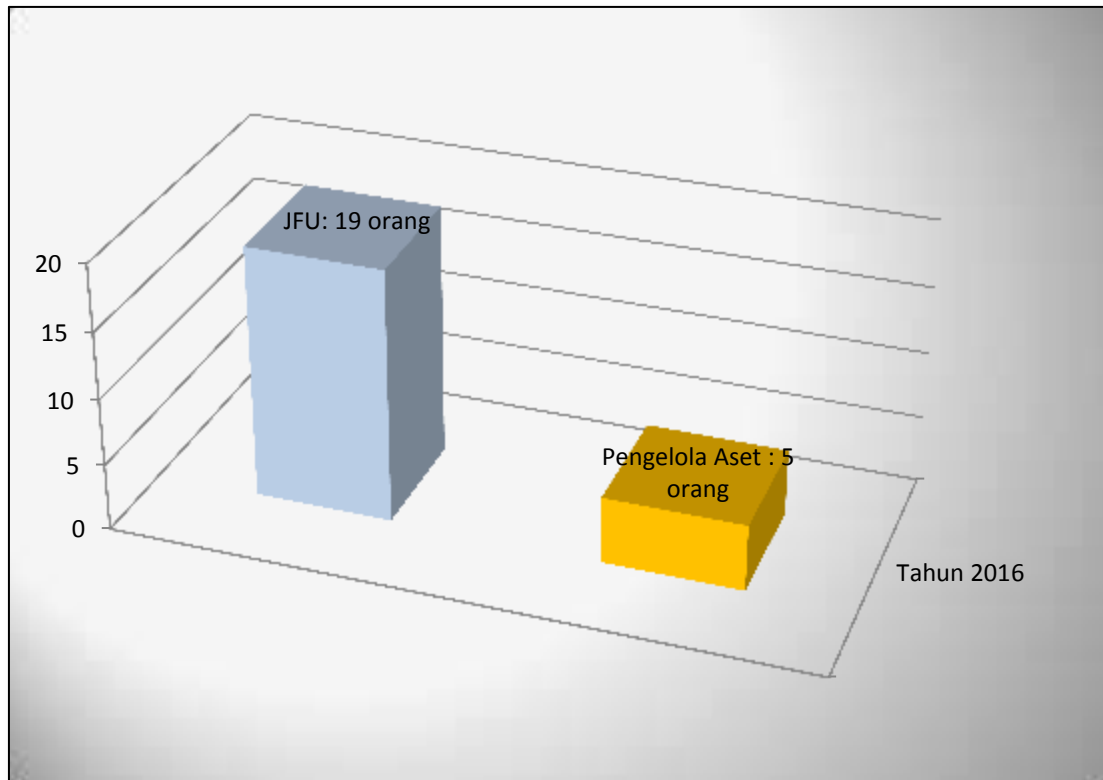


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru didukung oleh 55 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 7 golongan, meliputi : SLTP, SLTA, D2, D3, D4, S1 dan S2.





Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh Tenaga Non PNS yang berjumlah 24 orang terdiri dari 2 Jenis yaitu : Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Pengelola Aset.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah solusi bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan mengacu pada pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dituangkan sebagai berikut ini :



Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1. Kedudukan
 - 2. Tugas Pokok
 - 3. Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Lampiran-Lampiran



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Pada Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 mempunyai 8 Program dan 55 Kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
1	Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	1	Jumlah surat	4.400 lembar	15.600.000,-
			3.500 lembar surat masuk		
			900 lembar surat keluar		
		2	Jumlah langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6 Langganan yaitu aplikasi SIKDO, rekening air, listrik telpon dan internet	231.485.000,-
		3	Jumlah kendaraan dinas/operasional	46 Kali Pemeliharaan dan Perizinan (26 Unit, terdiri dari 5 unit mobil dinas 21 unit motor dinas)	26.100.000,-
		4	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan	1.478 orang kali pembayaran (67 orang)	2.401.400.000,-
		5	Jumlah jasa kebersihan kantor	4 kali jasa	89.500.000,-
6	Jumlah jasa alat tulis kantor	12 set	143.283.790,-		
7	Jumlah penyediaan barang cetak & penggandaan	12 kali penyediaan (set)	41.050.000,-		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		8	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 kali penyediaan (set)	22.105.300,-
		9	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kali penyediaan (set)	27.772.500,-
		10	Jumlah terbitan bahan bacaan	5 kali terbitan (1.825 penyediaan bahan bacaan)	8.580.000,-
		11	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	24.255 orang	252.820.000,-
		12	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140 orang kali	796.382.700,-
		13	Jumlah Pegawai Non PNS	737 kali pembayaran	618.830.000,-
		14	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	50 orang kali	60.000.000,-
		15	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	11 Kali	15.500.000,-
		16	Jlh pelaksanaan hari jadi, pameran dan HUT RI	3 kali	86.700.000,-
2	Tersedianya sarana dan prasarana dalam kelancaran pelaksanaan tugas	17	Jumlah kendaraan dinas/operasional	7 Unit Kendaraan	3.001.964.600,-
		18	Jumlah perlengkapan kantor	1 kali pengadaan (27 unit)	12.000.000,-
		19	Jumlah peralatan kantor	1 Kali pengadaan (35 unit)	189.885.000,-
		20	Jumlah buku/ke pustakaan	15 buku	2.170.000,-
		21	Jumlah rumah dinas	1 Kali pemeliharaan	417.097.000,-
		22	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 unit	177.560.000,-
		23	Jumlah peralatan kantor	4 unit	21.000.000,-
3	Tercapainya disiplin aparatur dalam berpakaian	24	Jumlah pakaian Dinas Harian Pegawai	94 stel	56.600.000,-
		25	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	91 baju	41.500.000,-
		26	Jumlah pakaian olahraga	91 stel	45.700.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



4	Terwujudnya peningkatan wawasan dan profesionalisme aparatur	27	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	15 orang	185.000.000,-
		28	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur BPKAD	12 kali	65.100.000,-
5	Tersusunnya dokumen yang dapat dipertanggung awaban	29	Jumlah dokumen laporan	18 Dok. laporan	95.300.000,-
				1 Laporan Kinerja/ LAKIP 2015	
				1 dokumen LPPD 2015	
				1 dokumen Renja 2017	
				1 dokumen Renja Perubahan 2016	
				1 dokumen Renstra BPKAD 2016-2021	
				1 dokumen RTP dan SPIP BPKAD 2016	
12 Dokumen laporan evaluasi program dan kegiatan					
30	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	241.000,-		
31	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	12.830.000,-		
32	Jumlah pelaporan E-Audit ke BPK-RI	12 Kali pelaporan E-Audit ke BPK RI	634.000.000,-		
6	Tersedianya data akuntansi yang baik & benar dalam hal evaluasi & pelaporan	33	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 dokumen	239.507.400,-
		34	Jumlah dokumen perda tentang APBD	1 dokumen	1.288.804.400,-
		35	Jumlah dok. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	5 dokumen	229.754.850,-
		36	Jumlah dokumen Perda tentang perubahan APBD	1 dokumen	995.789.000,-
		37	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 dokumen	181.731.900,-



		38	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	510.250.000,-
		39	Jumlah dokumen Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	150.000.000,-
		40	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 aplikasi SIMDA Keuangan	780.752.800,-
		41	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	300 Peserta	420.532.200,-
		42	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	168 Peserta	147.790.700,-
		43	Jumlah dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru	2 Dokumen	3.763.995.000,-
		44	Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD	4 dokumen	713.170.000,-
		45	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 dokumen	262.200.000,-
		46	Jumlah data pegawai per SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	58 data gaji SKPD	673.518.248,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		47	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 Dokumen	250.520.000,-
		48	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemkab Kotabaru	1 dokumen	450.000.000,-
		49	Jumlah dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas	58 data SKPD	335.920.800,-
		50	Jumlah Laporan Kas Daerah	6 dokumen	1.132.280.000,-
		51	Jumlah pelatihan penatausahaan aset/barang milik pemerintah daerah	1 Kali pelatihan	336.556.000,-
		52	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	1 dokumen	278.037.000,-
		53	Jumlah dokumen dan penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 dokumen	433.500.000,-
7	Tersedianya salah satu data sebagai bahan yang diperlukan dalam mengetahui realisasi keuangan SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru	54	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan pemkab kotabaru	60 dokumen register SP2D SKPD (1 Dokumen rekap register SP2D dan 59 dokumen register SKPD)	492.020.000,-
8	Meningkatkan pengetahuan Pengelola Keuangan Desa	55	Jumlah RAPBDes Yang dievaluasi	198 RAPBDes	832.242.050,-
Jumlah					24.693.879.238,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2016

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 mempunyai 8 program dan 55 kegiatan, rencana/target dan realisasi capaian kinerja yang dicapai pada Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2016
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016

NO	Program/ Kegiatan	Rencana/ Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			97,95
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400 lembar	4.400 lembar	100
		3.500 lembar surat masuk	3.500 lembar surat masuk	
		900 lembar surat keluar	900 lembar surat Keluar	
2	Penyediaan jasa kominakasi, sumber daya air, listrik	6 Langganan yaitu aplikasi SIKDO, rekening air, listrik telpon dan internet	6 Langganan yaitu aplikasi SIKDO, rekening air, listrik telpon dan internet	89,73
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46 Kali Pemeliharaan dan Perizinan (26 Unit, terdiri dari 5 unit mobil dinas 21 unit motor dinas)	46 kali pemeliharaan dan perizinan (26 unit terdiri dari 5 unit mobil dinas, 21 unit motor dinas)	73,08

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.478 orang kali pembayaran	1.478 orang kali pembayaran	98,58
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4 kali jasa	4 Kali Jasa	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	12 set	12 set	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 set	12 set	100,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 set	12 set	100,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 set	12 set	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 kali terbitan (1.825 penyediaan bahan bacaan)	1.825 terbitan (1.825 kali penyediaan bahan bacaan)	100,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	24.255 orang	21.550 orang	88,85
12	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	140 orang kali	140 orang kali	100,00
13	Pengadaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dan keamanan	737 kali pembayaran	730 kali pembayaran	99,05
14	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	50 orang kali	50 orang kali	100,00
15	Penyediaan Jasa pengumuman dan propaganda	11 Kali	11 Kali	100,00
16	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	3 kali	3 kali	100,00



II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			99,87
17	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	7 Unit Kendaraan	7 Unit Kendaraan	100,00
18	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 kali pengadaan (27 unit)	1 kali pengadaan (27 unit)	100,00
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Kali pengadaan (35 unit)	1 Kali pengadaan (35 unit)	100,00
20	Pengadaan buku/ kepustakaan	15 buku	15 buku	100,00
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	1 Kali pemeliharaan	1 Kali pemeliharaan	100,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	5 unit	5 unit	100,00
23	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 unit	3 unit	76,05
III.	Program peningkatan disiplin aparatur			100,00
24	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	94 stel	94 stel	100,00
25	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	91 baju	91 baju	100,00
26	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya	91 stel	96 stel	100,00
IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100,00
27	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	15 orang	100,00
28	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	12 kali	12 kali	100,00



V.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD			100,00
29	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Dok. laporan 1 Laporan Kinerja/ LAKIP 2015 1 dokumen LPPD 2015 1 dokumen Renja 2017 1 dokumen Renja Perubahan 2016 1 dokumen Renstra BPKAD 2016-2021 1 dokumen RTP dan SPIP BPKAD 2016 12 Dokumen laporan evaluasi program dan kegiatan	18 Dokumen Laporan	100,00
30	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
31	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	12 kali pelaporan E-Audit ke BPK RI	12 kali pelaporan E-Audit ke BPK RI	100,00
VI.	Program peningkatan dan pengembangan Pengelola keuangan daerah			99,52
33	Penyusunan analisa standar belanja	1 dokumen	1 dokumen	100,00
34	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



35	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	5 dokumen	5 dokumen	100,00
36	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
37	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	5 dokumen	5 dokumen	100,00
38	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
39	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
40	Penyusunan system informasi Pengelola keuangan daerah	1 aplikasi SIMDA Keuangan	1 Aplikasi SIMDA keuangan	100,00
41	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	300 Peserta	300 Peserta	100,00
42	Bimtek implementasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	168 Peserta	168 Peserta	100,00
43	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
44	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	4 dokumen	4 dokumen	92,00
45	Peningkatan Pengelola adm. keuangan daerah	60 dokumen	60 dokumen	97,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



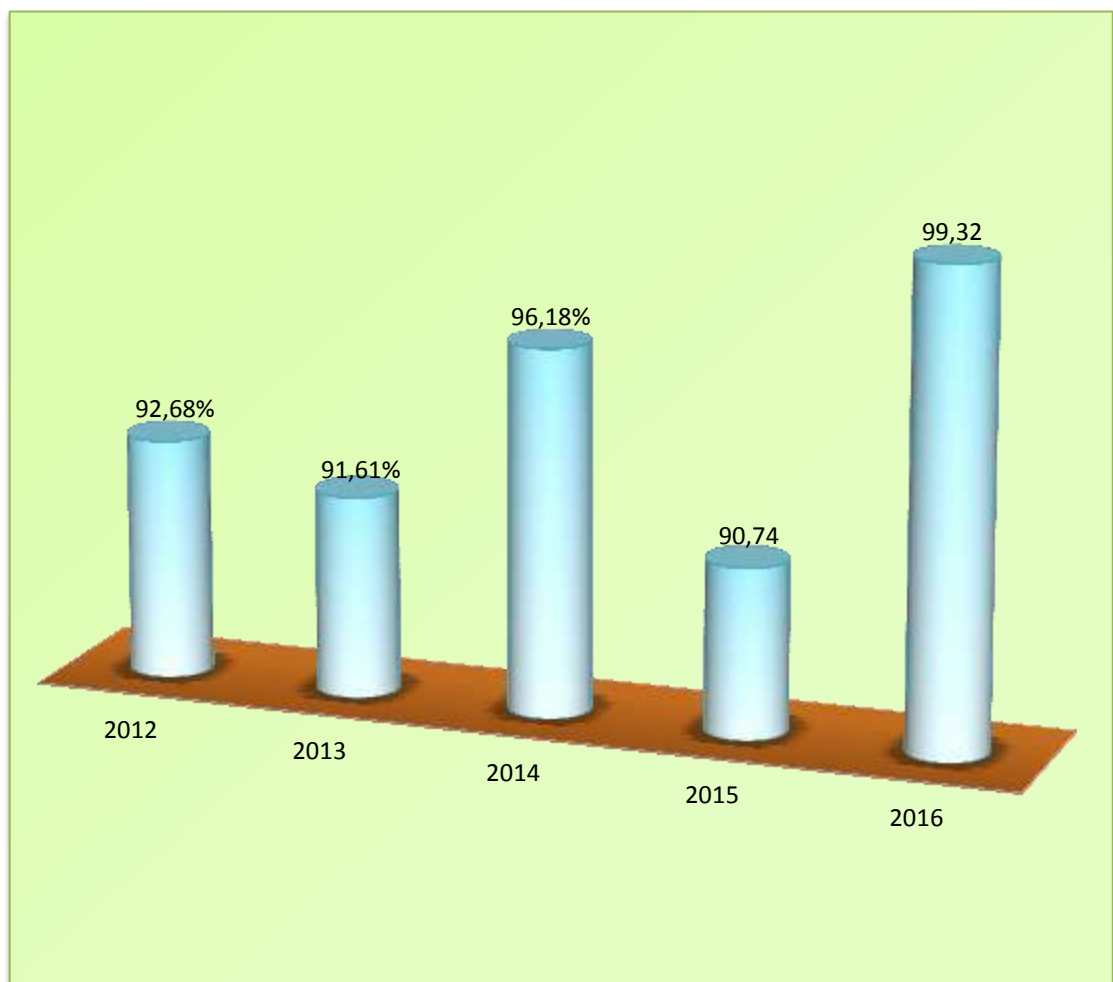
46	Peningkatan manajemen data gaji PNSD	58 data gaji SKPD	58 data gaji SKPD	100,00
47	Penyusunan lap. prognosis realisasi anggaran kab.	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
48	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 Dokumen	100,00
49	Penyusunan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	58 data SKPD	58 data SKPD	100,00
50	Penyusunan laporan kas daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00
51	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	1 Kali pelatihan	1 Kali pelatihan	100,00
52	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
53	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 dokumen	1 dokumen	100,00
VII.	Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelola keu Kab/kota			100,00
54	Peningkatan sarana pelayanan administrasi keuangan	60 dokumen register SP2D SKPD (1 Dok. rekap register SP2D dan 59 dokumen register SKPD)	60 dokumen register SP2D SKPD (1 Dok. rekap register SP2D dan 59 dokumen register SKPD)	100,00
VIII.	Program pembinaan dan fasilitasi Pengelola keuangan desa			100,00
55	Evaluasi rancangan peraturan desa ttg APBDesa (APBDes)	198 RAPBDes	198 RAPBDes	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				99,32



2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dari Tahun 2012 s/d 2016

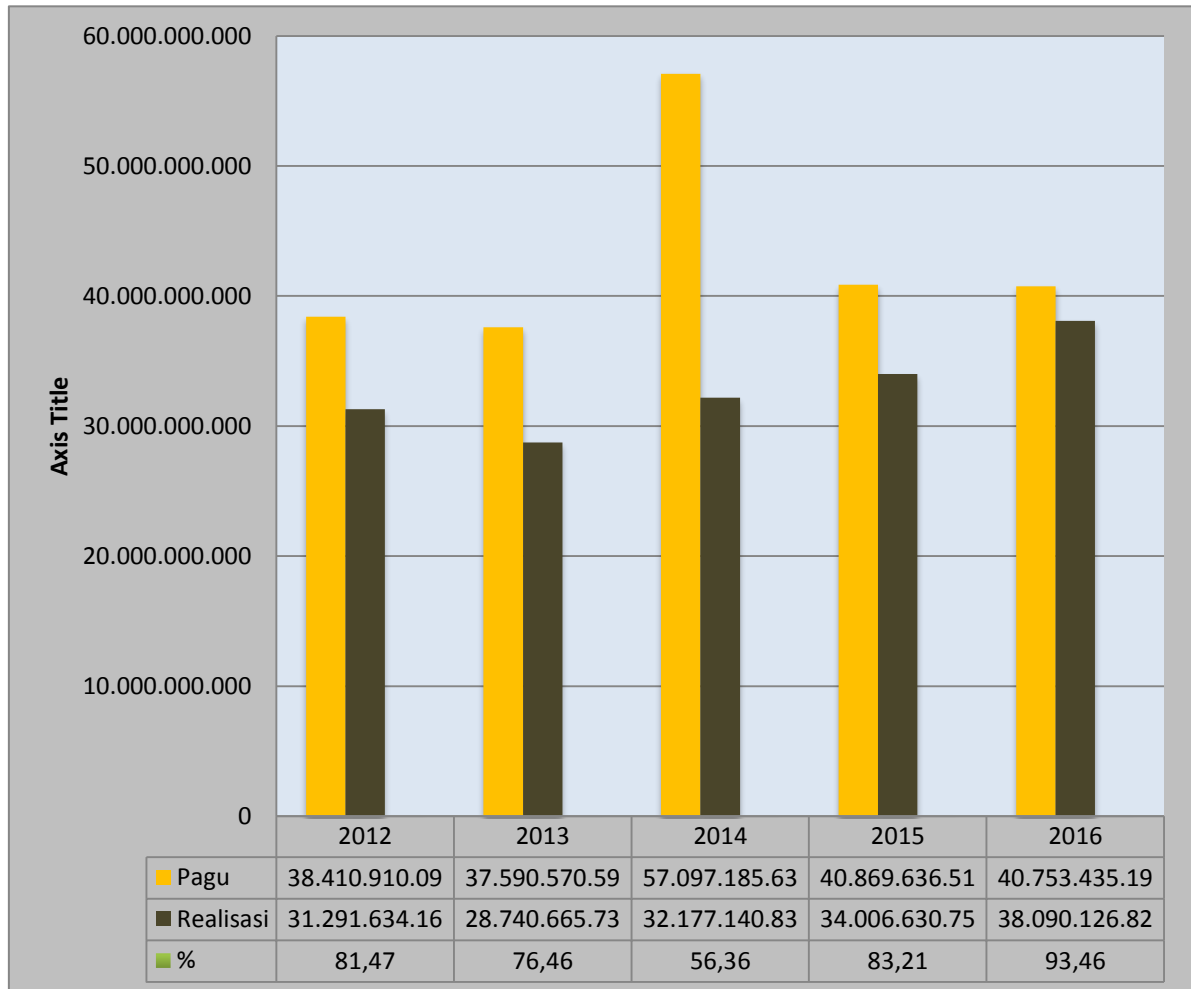
Realisasi kinerja/capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dari Tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja/Capaian Kinerja
Pada Belanja Lansung dari Tahun 2012 s/d 2016





Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Keuangan/Capaian Keuangan
Dari Tahun 2012 s/d 2016

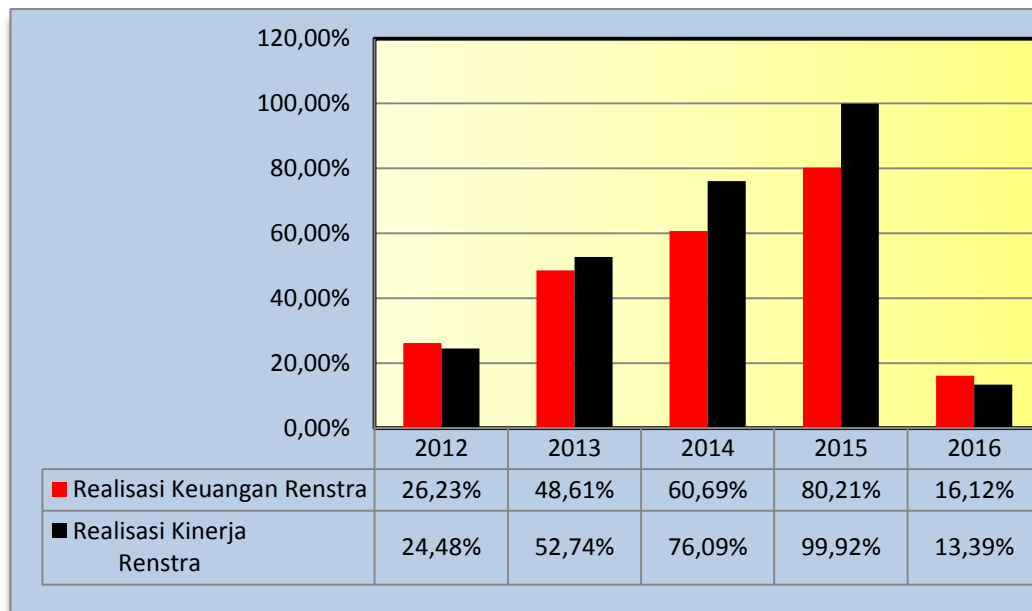


3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang Tertuang Dalam Renstra BPKAD

Perbandingan realisasi kinerja maupun realisasi keuangan Renstra dengan target jangka menengah dalam Renstra BPKAD Tahun 2012-2016, maka dapat dilihat pada tabel perbandingan capaian kinerja selama 6 tahun dalam tabel berikut :



Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Keuangan Renstra dan Realisasi Kinerja Renstra s/d 2016 dengan Target Jangka Menengah sebagaimana Renstra BPKAD 2012-2016



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang harus dilakukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pengelola keuangan dan aset daerah, terkait dengan hal tersebut ada beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang harus dilakukan, diantaranya :



I. Bagian Umum dan Kepegawaian

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) realisasi keuangannya sebesar 64,63%, hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya anggaran untuk pembelian air pada musim kemarau karena tidak terjadi kemarau dan anggaran listrik yang mana pada APBD Perubahan sudah dikurangi tetapi masih terdapat sisa yang tidak direalisasikan.

Alternatif solusi yang harus dilakukan adalah agar benar-benar dihitung anggarannya sesuai dengan kebutuhan seperti halnya untuk pembayaran listrik yang mana setiap bulannya sudah dapat diperkirakan besaran pembayarannya.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (01.06) realisasi keuangannya sebesar 70,34%, hal ini disebabkan karena ada 6 unit kendaraan yang pembayaran pajaknya tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan (pemakai) tidak menyerahkan Pajak/STNK asli ke Bagian Umum walaupun sudah diminta.

Alternatif solusi yang harus dilakukan adalah lebih proaktif lagi untuk meminta Pajak/STNK asli kepada pemakai kendaraan dinas atau pemakai tersebut yang membayar langsung ke Samsat sesuai dengan prosedur yang berlaku.



II. Bidang Anggaran

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (17.07) realisasi keuangannya sebesar 66,42%, hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya penganggaran belanja cetak dan penggandaan dokumen APBD 2017 terkait dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2017, seyogyanya APBD 2017 tersebut disahkan pada Tahun 2016.

Alternatif solusi yang harus dilakukan adalah pengesahan APBD sebelum tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut yaitu berupa beberapa aplikasi, diantaranya :

1) Aplikasi SIMDA Keuangan

Program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan, Versi Akrual digunakan untuk Pengelola keuangan daerah secara terintegritasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya, aplikasi SIMDA dimaksudkan untuk membantu Pengelola keuangan dengan baik di tingkat Perangkat Daerah. Aplikasi SIMDA Keuangan dirumuskan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan



Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 900/877/KEU dan 2187/PW16/2003 tanggal 22 Agustus 2003 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan prosedur Pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang handal, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dan meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Simda Keuangan memberikan manfaat lebih kepada Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan APBD yang lebih cepat, akurat dan sesuai ketentuan.

Program Aplikasi SIMDA Keuangan telah mulai digunakan Pemda Kotabaru sejak Tahun 2010, dimaksudkan untuk membantu Pengelola keuangan daerah baik di tingkat SKPD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPKD (entitas akuntansi).

2) *Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah*

Program aplikasi ini digunakan untuk Pengelola barang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA BMD bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Output aplikasi Simda BMD berupa Perencanaan Pengadaan, Penatausahaan, Penghapusan dan Akuntansi. Aplikasi ini digunakan untuk penyusunan buku, kartu dan laporan inventaris barang dengan output berupa KIB, KIR,



Label Kode Barang, RKBU, LBMD Semesteran dan Tahunan. Program Aplikasi SIMDA BMD mulai digunakan sejak tahun 2012 yang dipergunakan untuk membantu Pengelola barang daerah pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

3) *Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Gaji PNS*

Aplikasi ini akan membantu pemda untuk memproses, penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan. Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Gaji PNS Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara PT Taspen (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor JAN.13/C.3.1/2015 Nomor 02 Tahun 2015 tentang Implementasi sistem Informasi Pengelola Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif. Aplikasi Sistem Informasi Pengelola Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dikembangkan berdasarkan penggajian pegawainya, Aplikasi ini akan membantu pemerintah daerah untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan seperti : Daftar Gaji, Gaji terusan, Perhitungan Pajak, Daftar Pegawai dan Register-register, Kerjasama tersebut hanya selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017.

4) *Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO)*

Sejak Tahun 2014 BPKAD Kabupaten Kotabaru telah menjalin kerjasama dengan Bank KalSel dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO) yang



memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam memonitor arus kas dan ketersediaan dana pada Bank KalSel sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan kas daerah real time. Dengan sistem ini pelayanan perbendaharaan lebih cepat dan efisien.

5) Informasi Keuangan Daerah (IKD)

Informasi Keuangan Daerah (IKD) adalah sistem pelaporan keuangan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi dalam rangka untuk memudahkan sistem pelaporan keuangan baik untuk kabupaten maupun ke pusat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti dijelaskan dalam Bab III Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru melaksanakan 8 program yang terdiri dari 55 kegiatan, dari program dan kegiatan tersebut secara garis besar dapat kita lihat keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Perkembangan Belanja dan Realisasi Belanja Tahun 2016

Uraian	APBD	APBDP	Realisasi	%
Belanja	45.288.140.338,-	40.753.435.199,-	38.090.126.825,-	93,46
Belanja Tidak Langsung	17.794.048.250,-	16.059.555.961,-	15.381.313.224,-	95,78
Belanja Langsung	27.494.092.088,-	24.693.879.238,-	22.708.813.601,-	91,96



Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang capaian kinerjanya sangat kurang dari target, diantaranya :

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) realisasi kinerjanya sebesar 89,73%, yaitu dianggarkan untuk penyediaan pembayaran listrik tetapi realisasinya banyak tersisa karena pembayaran listrik tidak dapat diprediksikan setiap bulannya, sedangkan untuk belanja air disediakan dana untuk menghadapi musim kemarau tetapi tidak terealisasi karena tidak terjadi musim kemarau.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) realisasi kinerjanya sebesar 76,05% karena anggaran perbaikan genset dan pengisian tabung pemadam kebakaran tidak terealisasi berhubung tidak ada kerusakan genset sampai akhir tahun, sedangkan tabung pemadam tidak bisa diisi di Kotabaru.
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (01.06) realisasi keuangannya sebesar 73,08%, karena anggaran untuk perizinan kendaraan dinas/operasional berupa pembayaran perpanjangan STNK masih ada 6 unit yang tidak terealisasi karena pemakai tidak menyerahkan Pajak/STNK asli ke Bagian umum walaupun sudah diminta.



Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang capaian keuangannya kurang dari target atau tidak 100%, diantaranya :

- (1). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.02) realisasi keuangannya sebesar 64,63%, yaitu dianggarkan untuk penyediaan pembayaran listrik tetapi realisasinya banyak tersisa karena pembayaran listrik tidak dapat diprediksikan setiap bulannya, sedangkan untuk belanja air disediakan dana untuk menghadapi musim kemarau tetapi tidak terealisasi karena tidak terjadi musim kemarau.
- (2). Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (01.06) realisasi keuangannya sebesar 70,34%, karena anggaran untuk perizinan kendaraan dinas/operasional berupa pembayaran perpanjangan STNK masih ada 6 unit yang tidak terealisasi karena pemakai tidak menyerahkan Pajak/STNK asli ke Bagian umum walaupun sudah diminta.
- (3). Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (01.17) realisasi keuangannya sebesar 82,43%, disediakan tambahan dana untuk acara rapat dan untuk tambahan biaya makan tamu (BPK) ternyata tidak terealisasi karena anggaran sebelumnya masih mencukupi.
- (4). Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) realisasi keuangannya sebesar 76,05% karena anggaran perbaikan genset dan pengisian tabung pemadam kebakaran tidak terealisasi berhubung tidak ada



kerusakan genset sampai akhir tahun, sedangkan tabung pemadam tidak bisa diisi di Kotabaru.

- (5). Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (17.07) realisasi keuangannya sebesar 66,42%, karena RAPBD Tahun Anggaran 2017 belum disahkan di Tahun Anggaran 2016, maka untuk mencetak dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tidak bisa dilaksanakan.
- (6). Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (17.14) realisasi keuangannya sebesar 79.51% karena penganggaran untuk perjalanan dinas tidak terealisasi mengingat kegiatan sosialisasi paket regulasi tersebut dilaksanakan dalam daerah.
- (7). Kegiatan Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD realisasi keuangannya sebesar 64,41% karena APBD 2017 disahkan pada Tahun 2017 sehingga tidak terealisasi untuk cetak DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

B. Realisasi Anggaran

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 8 Program dan 55 Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 40.753.435.199,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 16.059.555.961,- dan Belanja Langsung Rp. 24.693.879.238,-



Realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 38.090.126.825,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.381.313.224,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 22.708.813.601,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja BPKAD
Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016

No	Jenis Belanja	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%
1 .	Belanja	40.753.435.199,-	38.090.126.825,-	93,46
2.	Belanja Tidak Langsung	16.059.555.961,-	15.381.313.224,-	95,78
3.	Belanja Langsung	24.693.879.238,-	22.708.813.601,-	91,96

Adapun realisasi tingkat capaian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Tingkat Capaian Keuangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2016

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Tingkat Capaian Keuangan (%)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.837.059.290,-	4.356.875.151,-	97,95
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	15.600.000,-	15.600.000,-	100,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	231.485.000,-	149.611.768,-	89,73

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.100.000,-	18.395.800,-	73,08
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.401.400.000,-	2.071.730.000,-	86,27
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89.500.000,-	88.745.000,-	99,16
6.	Penyediaan alat tulis kantor	143.283.790,-	142.864.425,-	99,71
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.050.000,-	40.800.000,-	99,39
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	22.105.300,-	21.635.100,-	97,87
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	27.722.500,-	27.671.400,-	99,82
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.580.000,-	8.580.000,-	100,00
11.	Penyediaan makanan dan minuman	252.820.000,-	208.405.000,-	82,43
12.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah	796.382.700,-	792.652.658,-	99,53
13.	Pengadaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan keamanan	618.830.000,-	612.410.000,-	98,96
14.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah	60.000.000,-	55.910.000,-	93,18
15.	Penyediaan pengumuman dan propaganda	15.500.000,-	15.500.000,-	100,00
16.	Penyediaan data, informasi dan publikasi kinerja pelayanan	86.700.000,-	86.400.000,-	99,65
II.	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	3.821.676.600,-	3.738.045.802,-	99,87
17.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.001.964.600,-	2.928.459.050,-	97,55

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



18.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.000.000,-	12.000.000,-	100,00
19.	Pengadaan peralatan gedung kantor	189.885.000,-	189.684.000,-	99,89
20.	Pengadaan buku/kepuustakaan	2.170.000,-	2.270.000,-	100,00
21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	417.097.000,-	402.342.752,-	96,46
21.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	177.560.000,-	177.420.000,-	99,92
23.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.000.000,-	15.970.000,-	76,05
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	143.800.000,-	143.008.000,-	99,45
24.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56.600.000,-	56.233.000,-	99,35
25.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	41.500.000,-	41.250.000,-	99,40
26.	Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya	45.700.000,-	45.525.000,-	99,62
IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	250.100.000,-	216.139.619,-	86,42
27.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	185.000.000,-	151.039.619,-	81,64
28.	Pembinaan mental dan fisik aparatur	65.100.000,-	65.100.000,-	100,00
V.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	13.574.610.298,-	12.292.828.957,-	90,56
29.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	95.300.000,-	92.537.500,-	97,10

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



30.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD	241.000,-	241.000,-	100,00
31.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.830.000,-	10.830.000,-	84,41
32.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	634.000.000,-	616.975.000,-	97,31
VI.	Program peningkatan & pengembangan Pengelola keuangan daerah	12.151.971.997,-	10.174.370.944,-	83,73
33.	Penyusunan analisa standar belanja	239.507.400,-	229.058.723,-	95,64
34.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.288.804.400,-	1.164.655.034,-	90,37
35.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	229.754.850,-	152.612.350,-	66,42
36.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	995.789.000,-	935.904.568,-	93,99
37.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	181.731.900,-	181.731.900,-	100,00
38.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	510.250.000,-	452.767.451,-	88,73
39.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	150.000.000,-	150.000000,-	100,00
40.	Penyusunan sistem informasi Pengelola keuangan daerah	780.752.800,-	680.012.375,-	87,10
41.	Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	420.532.200,-	334.350.083,-	79,51

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



42.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Pengelola keuangan daerah	147.790.700,-	144.100.670,-	97,50
43.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	3.763.995.000,-	3.543.749.092,-	94,15
44.	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	713.170.000,-	649.841.863,-	91,12
45.	Peningkatan Pengelola administrasi keuangan daerah	262.200.000,-	216.460.000,-	82,56
46.	Peningkatan manajemen data gaji PNSD	673.518.248,-	633.017.135,-	93,99
47.	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	250.520.000,-	250.519.599,-	99,99
48.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	450.000.000,-	402.484.994,-	89,44
49.	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	335.920.800,-	219.720.800,-	65,41
50.	Penyusunan laporan kas daerah	1.132.280.000,-	954.787.060,-	84,32
51.	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	336.556.000,-	332.950.500,-	98,93
52.	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	278.037.000,-	271.037.000,-	97,48
53.	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	433.500.000,-	393.067.760,-	90,67
VII.	Program pembinaan dan Fasilitasi Pengelola keuangan Kabupaten/kota	492.020.000,-	432.972.272,-	88,00
54.	Peningkatan sarana pelayanan administrasi keuangan	492.020.000,-	432.972.272,-	88,00
VIII.	Program pembinaan dan fasilitasi Pengelola keuangan desa	832.242.050,-	818.360.300,-	98,33

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



55.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa (APBDes)	832.242.050,-	818.360.300,-	98,33
Rata - rata capaian kinerja keuangan (%)				91,96



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi pencapaian target indikator Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian keberhasilan dan atau kegagalan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini tentu saja karena dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan kinerja BPKAD perlu langkah dan kebijakan yang strategis, seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, peningkatan sarana dan prasarana pendukung perkantoran serta adanya konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2016
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input Jumlah Dana Output Jumlah Surat Outcome Distribusi Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar	Rupiah Jumlah	Dana : Rp 15.600.000 Keluaran : 4.400 Lembar Hasil : 100,00%	Dana : Rp 15.600.000 Keluaran : 4.400 Lembar 3.439 Lembar Surat Masuk 961 Lembar Surat Keluar Hasil : 100,00%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Input Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp 231.485.000	Dana : Rp 149.611.768,00	89,73%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



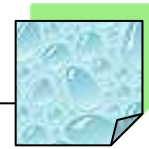
	Air dan Listrik	Output	Jumlah Langganan Pembayar an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali	Keluaran : 6 Langganan	Keluaran : 6 Langganan yaitu (8 biaya aplikasi sikdo pengelolaan kas, 4 kali biaya layanan telkom solution untuk aplikasi sikdo, 4 yaitu pembayaran telpon, SIKDO, air, Pembelian Air, listrik, internet/spe dy, Retribusi Sampah)	
		Outcome	Terlaksanan ya Kinerja Kantor	persenta se	Hasil : 100%	Hasil : 64,68%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp 26.100.000,00	Dana : Rp 18.359.800,0 0	73,08%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	kendaraan dinas/ operasional	Output	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kali	Keluaran : 26 Unit	Keluaran : 19 Unit	
		Outcome	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Untuk Pelayanan Kantor	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 70,34%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 2.401.400.000	Dana : Rp. 2.071.730.000	98,58%
		Output	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	Orang Kali Pembayaran	Keluaran : 1.478 Orang Kali Pembayaran (67 Orang)	Keluaran : 1.457 Orang kali pembayaran (64 orang)	
		Outcome	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan SKPD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 86,27%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 89.500.000	Dana : Rp. 88.745.000	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



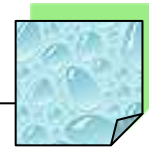
	Kantor	Output	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Kali	Keluaran : 4 Kali Jasa	Keluaran : 4 Kali Jasa	
		Outcome	Terciptanya Lingkungan Yang Bersih	persentase	Hasil : 100%	Hasil : 99,16%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 143.283.790	Dana : Rp. 142.864.425	100,00%
		Output	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kali	Keluaran : 12 Set	Keluaran : 12 Set	
		Outcome	Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	persentase	Hasil : 100%	Hasil : 99,71%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 41.050.000	Dana : Rp. 40.800.000	100,00%
		Output	Jumlah Penyediaan Pembayaran Barang Cetak dan Penggandaan	Kali	Keluaran : 12 Set	Keluaran : 12 Set	
		Outcome	Tercapainya Kelancaran Administrasi	persentase	Hasil : 100%	Hasil : 99,39%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



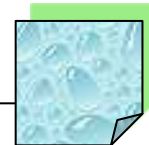
			i Perkantoran				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tercapainya Kelancaran Administراس i Perkantoran	Rupiah Kali persentase	Dana : Rp. 22.105.300 Keluaran : 12 Set Hasil : 100%	Dana : Rp. 21.635.100 Keluaran : 12 Set Hasil : 97,87%	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor	Rupiah Kali persentase	Dana : Rp. 27.722.500 Keluaran : 12 Set Hasil : 100%	Dana : Rp. 27.671.400 Keluaran : 12 Set Hasil : 99,82%	100,00%
	Penyediaan	Input	Jumlah	Rupiah	Dana : Rp.	Dana : Rp.	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



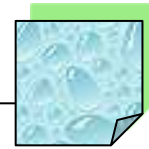
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output	Dana Jumlah Terbitan Bahan Bacaan	Kali	8.580.000 Keluaran : 1.852 Kali Penyediaan Bahan Bacaan	8.580.000 Keluaran : 5 Terbitan (1.825 kali penyediaan bahan bacaan)	
		Outcome	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur	persentase	Hasil : 100%	Hasil : 100,00%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 252.820.000	Dana : Rp. 208.405.000	88,85%
		Output	Jumlah Orang Yang Mendapat Makanan dan Minuman	Bulan	Keluaran : 24.255 Orang	Keluaran : 21.550 Orang	
		Outcome	Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 82,43%	
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 796.382.700	Dana : Rp. 792.652.658	100,00%
		Output	Jumlah Rapat Koordinasi dan	Kali	Keluaran : 140 Orang Kali	Keluaran : 140 Orang Kali (151 orang yang benarnya)	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



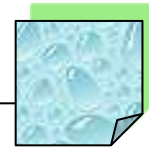
		Outcome	Konsultasi Ke Luar Daerah Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,53%	
	Pengadaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran dan Keamanan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 618.830.000	Dana : Rp. 612.410.000	99,05%
Output		Jumlah Pegawai Non PNS	Kali	Keluaran : 737 Orang	Keluaran : 730 Orang		
Outcome		Aktifitas Kelancaran Lancar	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,86%		
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 60.000.000	Dana : Rp. 55.910.000	100,00%
Output		Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	Keluaran : 50 Orang Kali	Keluaran : 50 Orang Kali		
Outcome		Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 93,18%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



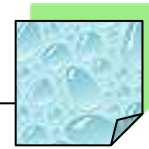
	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 15.500.000	Dana : Rp. 15.500.000	100,00%
		Output	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kali	Keluaran : 11 Kali	Keluaran : 11 Kali	
		Outcome	Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 86.700.000	Dana : Rp. 86.400.000	100,00%
		Output		Kali	Keluaran : 3 Kali Pelaksanaan	Keluaran : 3 Kali Pelaksanaan	
		Outcome		persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,65%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 3.001.964.600	Dana : Rp. 2.928.459.050	100,00%
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	kali/paket	Keluaran : 10 Unit Kendaraan Dinas	Keluaran : 7 Unit Kendaraan Dinas	
		Outcome	Lancarnya Aktivitas	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 97,55%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		Kinerja Kantor					
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 12.000.000	Dana : Rp. 12.000.000	100,00%
		Output	Jumlah Perlengkapan Kantor	Kali	Keluaran : 27 Unit	Keluaran : 1 Kali Pengadaan (27 Unit)	
		Outcome	Lancarnya Aktivitas Kinerja Kantor	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 189.885.000	Dana : Rp. 189.684.000	100,00%
		Output	Jumlah Peralatan Kantor	Kali	Keluaran : 35 Unit	Keluaran : 1 Kali Pengadaan (35 Unit)	
		Outcome	Lancarnya Aktivitas Kinerja Kantor	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
	Pengadaan Buku / Kepustakaan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 2.170.000	Dana : Rp. 2.170.000	100,00%
		Output	Jumlah Buku / Kepustakaan	Kali	Keluaran : 15 Buah Buku	Keluaran : 15 Buah Buku	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



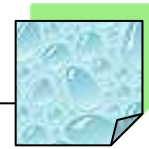
		Outcome	Lancarnya Aktivitas Kinerja Kantor	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 417.097.000	Dana : Rp. 402.342.752	100,00%
		Output	Jumlah Rumah Dinas	Kali	Keluaran : 1 Unit	Keluaran : 1 Unit	
		Outcome	Terpeliharanya Rumah Dinas Sehingga Aktifitasi Aparatur Lancar	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 96,46%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 177.560.000	Dana : Rp. 177.420.000	100,00%
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Kali	Keluaran : 5 Unit	Keluaran : 5 Unit	
		Outcome	Terciptanya Mobil Dinas Yang Terpelihara	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,92%	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 21.000.000	Dana : Rp. 15.970.000	76,05%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



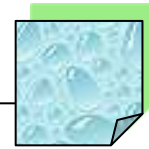
	Peralatan Gedung Kantor	Output	Jumlah Peralatan Kantor	Kali	Keluaran : 4 Unit	Keluaran : 3 Unit (Kali Pembayaran)	
		Outcome	Terciptanya Gedung Kantor	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 76,05%	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 56.600.000	Dana : Rp. 56.233.000	100,00%
		Output	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	Buah	Keluaran : 94 Stel	Keluaran : 94 Stel	
		Outcome	Terwujudnya Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,35%	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 41.500.000	Dana : Rp. 41.250.000	100,00%
		Output	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Buah	Keluaran : 91 Baju	Keluaran : 91 Baju	
		Outcome	Terwujudnya Disiplin Aparatur Dalam	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,40%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		Berpakaian					
	Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 45.700.000	Dana : Rp. 45.525.000	100,00%
		Output	Jumlah Pakaian Olahraga	Buah	Keluaran : 91 Stel	Keluaran : 91 Stel	
		Outcome	Terwujudnya Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 99,62%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 185.000.000	Dana : Rp. 151.039.619	100,00%
		Output	Jumlah Oran Yang Mengikuti Sosialisasi	Orang Kali	Keluaran : 15 Kali	Keluaran : 15 Orang Kali	
		Hasil	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 81,64%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



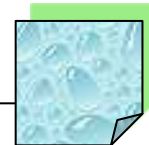
	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 65.100.000	Dana : Rp. 65.100.000	100%
		Output		Orang Kali	Keluaran : 12 Kali	Keluaran : 12 Kali	
		Hasil		persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana Rp. 95.300.000	Dana Rp. 92.537.500	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Laporan	Kali	Keluaran 18 Dokumen	Keluaran 18 Dokumen	
		Outcome	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja	persentase	Hasil 100,00%	Hasil : 97,10%	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 241.000	Dana : Rp. 241.000	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Laporan	Buah	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunya Laporan Prognosis	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



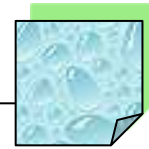
		Realisasi Anggaran					
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 12.830.000	Dana : Rp. 10.830.000	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Laporan	Orang/K ali	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 84,41%	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 634.000.000	Dana : Rp. 616.975.000	100,00%
		Output	Jumlah Objek Yang Diawasi / Diperiksa, titik pemekrisaan / pengawasan	Orang/K ali	Keluaran : 12 Lokasi (12 Kali Pelaksanaan Pelaporan E - Audit ke BPK RI)	Keluaran : 12 Kali Pelaporan e-audit ke BPK RI	
		Outcome	Tersusunnya pelaksanaan pembuatan dokumen laporan evaluasi	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 97,31%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



			kegiatan SKPD dan laporan E-Audit BPK RI				
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 249.507.400	Dana : Rp. 229.058.723	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja	Buah	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 95,64%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 1.288.804.400	Dana : Rp. 1.168.655.034	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Perda Tentang APBD	Buah	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Perda APBD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 90,68%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana	Rp. 229.754.850	Dana : Rp. 152.612.350	70,00%
		Output	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	Buah	Keluaran	5 Dokumen	Keluaran : 4 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	persentase	Hasil	100,00%	Hasil : 66,42%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana	: Rp. 995.789.000	Dana : Rp. 935.904.568	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Perda Tentang Perubahan APBD	Buah	Keluaran	: 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Hasil	Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD	persentase	Hasil	: 100,00%	Hasil : 93,99%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rupiah Buah persentase	Dana : Rp. 181.731.900 Keluaran : 5 Dokumen Hasil : 100,00%	Dana : Rp. 181.731.900 Keluaran : 5 Dokumen Hasil : 100,00%	100,00%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rupiah Buah	Dana : Rp. 510.250.000 Keluaran : 1 Dokumen	Dana : Rp. 452.767.451 Keluaran : 1 Dokumen	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		Outcome	Tersusunnya Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 88,73%	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana Rp. 150.000.000	Dana : Rp. 150.000.000	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Buah	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 100,00%	
	Penyusunan Sistem	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 780.752.800	Dana : Rp. 680.012.375	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Output Outcome	Jumlah Aplikasi SIMDA Dalam Pelaksanaan TUKD SKPD Lancarnya TUKD SKPD Dalam Aplikasi SIMDA	Buah persentase	Keluaran : 1 Aplikasi SIMDA Keuangan Hasil : 100,00%	Keluaran : 1 Aplikasi SIMDA Keuangan Hasil : 87,10%	
	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisai Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Pengetahuan Aparaturn Setelah Mengikuti	Rupiah Orang persentase	Dana : Rp. 420.532.200 Keluaran : 300 Peserta Hasil : 100,00%	Dana : Rp. 334.350.083 Keluaran : 300 Peserta Hasil : 79,51%	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		Sosialisasi					
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 147.790.700	Dana : Rp. 144.100.670	100,00%
		Output	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemtansi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	Keluaran : 150 Peserta	Keluaran : 168 Peserta	
		Outcome	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Setelah Mengikuti Bimtek	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 97,50%	
	Peningkatan Manajemen Aset / Barang	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 3.763.995.000	Dana : Rp. 3.543.749.092	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Daerah	Output	Jumlah Dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kab. Kotabaru	Dokumen	Keluaran : 5 Dokumen	Keluaran : 5 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Kotabaru	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 94,15%	
	Revaluasi Apraisal Aset / Barang Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 713.170.000	Dana : Rp. 649.841.863	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Data Nilai Aset per SKPD	Dokumen	Keluaran : 4 Dokumen	Keluaran : 4 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Data Nilai Aset per SKPD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 91,12%	
	Peningkatan Pengelolaan	Input	Dana SDM	Rupiah	Dana : Rp. 262.200.000	Dana : Rp. 216.460.000	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Administrasi Keuangan Daerah	Output	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen	Keluaran : 60 Dokumen (SKPD)	Keluaran : 58 Dokumen	
		Outcome	Terciptanya Administrasi Keuangan Daerah SKPD	persentase	Hasil : 100,00%	Hasil : 82,56%	
	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 673.518.248	Dana : Rp. 633.017.135	100,00%
		Output	Jumlah Data Pegawai Per SKPD Yang Berhak Menerima Gaji dan Tunjangan	Data SKPD	Keluaran : 58 Data SKPD	Keluaran : 58 Data SKPD	
		Outcome	Terlaksananya Data Pegawai Per SKPD Untuk Menerima Gaji dan Tunjangan	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 93,99%	
	Penyusunan Pelaporan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 250.520.000	Dana : Rp. 250.519.599	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Output Outcome	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Tersusunnya Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Kotabaru	Dokumen Kegiatan	Keluaran : 1 Dokumen Hasil : 100,00%	Keluaran : 1 Dokumen Hasil : 100,00%	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Input Output Outcome	Jumlah Dana Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab Kotabaru Tersusunnya Dokumen Keuangan Akhir Tahun Pemkab Kotabaru	Rupiah Dokumen Kegiatan	Dana : Rp. 450.000.000 Keluaran : 1 Dokumen Hasil : 100,00%	Dana : Rp. 402.484.994 Keluaran : 1 Dokumen Hasil : 89,44%	89,44%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Penyusunan DPA-SKPD / DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 335.920.800	Dana : Rp. 219.720.800	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen DPA-SKPD / DPPA-SKPD dan Anggaran Kas	Dokumen	Keluaran : 2 Dokumen	Keluaran : 2 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD/DPPA SKPD dan Anggaran Kas	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 65,41%	
	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 1.132.280.000	Dana : Rp. 954.787.060	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah	Dokumen	Keluaran : 6 Dokumen	Keluaran : 6 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Laporan Kas Daerah	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 84,32%	
	Pelatihan Penatausahaan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 336.556.000	Dana : Rp. 332.950.500	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



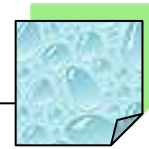
	Aset / Barang Milik Pemerintah Daerah	Output	Jumlah pelatihan penatausahaan aset/barang milik pemerintah daerah (jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penatausahaan aset / barang milik daerah)	Dokumen	Keluaran : 1 Kali Pelatihan	Keluaran : 1 Kali Pelatihan (.....peserta)	
		Outcome	Tersusunnya Pelatihan Penatausahaan Aset / Barang Milik Pemerintah Daerah	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 98,93%	
Pelatihan Teknis Akuntansi	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 0	Dana : Rp. 0	Dana : Rp. 0	0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



	Pemerintah Daerah	Output	Jumlah Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah (jumlah peserta pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah)	Dokumen	Keluaran : 0 Kali Pelatihan	Keluaran : 0 Kali Pelatihan	
		Outcome	Tersusunnya Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 0,00%	
	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 278.037.000	Dana : Rp. 271.037.000	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Laporan	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 97,48%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



		Anggaran Belanja					
	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 433.500.000	Dana : Rp. 393.067.760	100%
		Output		Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	Keluaran : 1 Dokumen	
		Outcome		Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 90,67%	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 492.020.000	Dana : Rp. 432.972.272	100,00%
		Output	Jumlah Dokumen Register SP2D SKPD di Lingkungan Pemkab Kotabaru	Dokumen	Keluaran : 60 Dokumen Register SP2D (1 Dokumen Rekap dan 59 Dokumken Register SP2D SKPD)	Keluaran : 60 Dokumen Register SP2D (1 Dokumen Rekap dan 59 Dokumken Register SP2D SKPD)	
		Outcome	Tersusunnya Dokumen Register SP2D	Kegiatan	Hasil : 100,00%	Hasil : 88,00%	
Program Pembinaan	Evaluasi Rancangan	Input	Jumlah Dana	Rupiah	Dana : Rp. 832.242.500	Dana : Rp. 818.360.300	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



n dan Fasilitasi Pengelola n Keuangan Desa	Peraturan Desa Tentang APBD Desa (APBDES)	Output Outcome	Jumlah RAPBDes Yang Dievaluasi Terlaksana n ya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Kali/Bua h persenta se	Keluaran : 198 RAPBDes Hasil : 100,00%	Keluaran : 198 RAPBDes Hasil : 98,33%
---	---	---	--	---	---	---